

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap tereujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan perubahan informasi untuk akuntansi maupun administrasi publik bagi pengelola laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini ditandai adanya tuntutan dari masyarakat dengan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, tertib, serata teratur dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terwujudnya *good governance* mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pertanggungjawabkan keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang disajikan pemerintah daerah mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Kualitas LKPD setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dimana Opini BPK diberikan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK meberikan Opini WTP terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Mahardini dan Miranti, 2018).

Kualitas laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila kualitas tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kompetensi sumber daya manusia dalam konteks perwujudan laporan keuangan bagi siapa pun termasuk pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam rangka perwujudan integritas keuangan. Suatu prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan melakukan ringkasan, bagi suatu transaksi keuangan serta pelaporan keuangan yang dikerjakan secara manual maupun komputerisasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintah kemungkinan besar semakin bagus kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dalam hal ini berarti pemahaman dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan dalam penyusunan LKPD menentukan kualitas LKPD Kabupaten Kudus. (Rahmah 2018) menjelaskan bahwa pemahaman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya pemahaman yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang baik pula, serta berpengaruh terhadap kinerja suatu pelaporan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitiannya (Rahmah 2018) menunjukkan bahwa penerapan standart akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia sangat terkait dengan kinerja yang dihasilkan. Kompetensi sumber daya manusia berperan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya keahlian yang dimiliki serta rendahnya kompetensi yang dimiliki akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta dikhawatirkan akan adanya kekeliruan pada proses penyusunan laporan keuangan tersebut (Soimah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Delanno dan Deviani, 2013) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai pelaporan keuangan daerah. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, (Zuliarti, 2012) mengungkapkan hal yang berbeda, yakni sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya apabila suatu organisasi menerapkan komitmen organisasi terhadap sumber daya manusianya dalam menyusun laporan keuangan tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tersebut.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan keandalan data akuntansi yang dihasilkan (Warren et al, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Nurillah, 2014) menunjukkan bahwa melalui sistem pengendalian internal yang baik juga akan mengurangi resiko adanya kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik juga harus

sejalan dengan bagian-bagian dan fungsi yang terkait dapat berintegrasi dengan masing-masing tugas dan tanggungjawabnya sehingga sistem yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh (Harmoni, 2016) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian sangat dibutuhkan tidak hanya untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan, namun juga agar memberikan jaminan dilaksanakannya strategi yang direncanakan pada instansi secara efektif dan efisien agar tercapainya laporan keuangan yang baik. Tetapi, menurut (Mokoginta,2017) hasil penelitian yang telah dilakukannya membuktikan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berarti sistem pengendalian internal yang telah dijalankan sudah baik namun dalam penerapannya belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Semakin tinggi komitmen organisasi seorang karyawan maka semakin tinggi loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Tingginya loyalitas maka diharapkan akan meningkatkan motivasi kinerja karyawan dan memiliki pengendalian internal dalam diri untuk memajukan organisasi yang dijalankan (Cherington, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh (Luthans, 2006) mengatakan bahwa sikap, komitmen organisasi didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Sedangkan menurut (kurnia, 2013) mengatakan bahwa membuat karyawan agar

memiliki komitmen yang tinggi adalah sangat penting terutama pada perusahaan non profit (seperti sektor publik) yang skala gajinya tidak kompetitif. (Noprial, 2015) menemukan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Namun menurut (Harlinda 2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi yang semakin maju akan memberikan dampak positif jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Adanya berbagai teknologi informasi ini dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi dengan lebih cepat serta lebih akurat dan meminimalisir adanya kekeliruan (Indrisari, 2008). Menurut Jogiyanto (2006) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam memudahkan pengelolaan data serta informasi sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. penelitian yang dilakukam oleh Harnoni (2016) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang berkompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan dan terbatasnya anggaran bagi pengembangan teknologi informasi itu sendiri.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dalam hal tersebut terdapat fenomena yang berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Tengah Pada 2015 BPK memberikan opini WTP atas LKPD Tahun 2014 untuk 12 Pemerintah Daerah dan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) untuk 24 Pemerintah Daerah. Pada tahun selajutnya (2016) sebanyak 21 Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2015 dan 15 Pemerintah Daerah meraih opini WDP. Sedangkan pada 2017 sebanyak 31 Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) memperoleh opini WTP sementara sisanya empat daerah mendapatkan opini WDP dan satu daerah masih dalam proses penyelesaian laporan.

Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh belum diterapkannya sistem informasi akuntansi keuangan atau kurangnya pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dan atau peran internal audit yang masih lemah. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam pada salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus. Meskipun Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah mendapatkan Opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan

pemerintah daerah antara lain Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber daya manusia, system pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan (jatengprov.go.id).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan ruang kerja bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus beserta sejumlah ruang kerja beberapa organisasi perangkat daerah, Minggu (28/7/2019). Sejumlah ruang kerja OPD yang diperiksa tim KPK, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ruang kerja staf khusus bupati, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Organisasi Kepegawaian Setda Kudus. Tim KPK yang bertugas melakukan penggeledahan memakai rompi bertuliskan KPK dengan didampingi Aparat kepolisian Resor Kudus serta Wakil Bupati Kudus M. Hartopo dan Asisten III Setda Kudus Masut. Wakil Bupati Kudus Muhammad Hartopo di Kudus, membenarkan bahwa pemeriksaan oleh tim KPK tidak hanya terbatas di ruang staf khusus bupati, Sekda Kudus, dan BPPKAD, melainkan juga melakukan pemeriksaan di kantor Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus. Selain melakukan pemeriksaan di sejumlah ruang kerja, mereka juga membawa sejumlah dokumen yang dianggap menjadi dasar atau bukti-bukti lain. Dengan adanya pemeriksaan oleh tim KPK, dia memastikan, sejumlah ruang kerja yang sebelumnya disegel oleh KPK, Senin (28/7) sudah bisa digunakan untuk aktivitas kerja. Ia memperkirakan

pemeriksaan oleh tim KPK akan terus berlanjut, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi-saksi juga akan dilakukan (Liputan6.com).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Dewi dkk (2017) yang berjudul dampak penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi banten tahun anggaran 2015. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan yaitu pertama, penambahan variabel sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Alasan menambah variabel sistem pengendalian internal yaitu hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Alasan penambahan variabel yang komitmen organisasi yaitu semakin tinggi komitmen organisasi, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan (Agung,2018). Alasan penambahan variabel yang pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah keuangan daerah akan meningkatkan serta mempercepat proses transaksi dan pengelolaan data sehingga dapat mempercepat kinerja pemerintah daerah dalam menangani peningkatan volume transaksi keuangan (Harlinda, 2016). Kedua yaitu terkait objek penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017) yaitu SKPD provisi Banten sedangkan objek penelitian ini OPD kabupaten Kudus.

Dari latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik mengambil judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS) ”**.

1.2 Ruang Lingkup

Biasanya setiap penelitian akan memberikan batasan pada ruang lingkup pengkajian pada suatu permasalahan tertentu yang berhubungan erat dengan tujuan yang diharapkan dari penelitian. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, maka peneliti perlu membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Variabel independen adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi dan informasi
2. Objek penelitian ini hanya meneliti Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
3. Responden yang akan dijadikan sampel adalah karyawan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang bekerja dibagian akuntansi

atau tata usaha keuangan dan pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau pengelolaan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah.

Rumusan masalah yang diajukan dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis dan menguji apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis dan menguji apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Untuk menganalisis dan menguji apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis dan menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Untuk menganalisis dan menguji apakah pemanfaatan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama dalam bidang akuntansi sektor publik serta wawasan tentang pengukuran tingkat kualitas laporan keuangan daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas serta memberikan wawasan mengenai pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan pihak lain guna menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan peneliti selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Peneliti ini mengharapkan untuk bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dan paduan untuk menilai kualitas kinerja karyawan pemerintah daerah.

